

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2026 berhasil disusun tepat waktu. Dokumen ini merupakan perencanaan strategis yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai aspek penting, serta tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang lebih lanjut menekankan pentingnya pemutakhiran data dan penyelarasan klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur serta menjadi panduan operasional bagi seluruh perangkat DPMPTSP Kota Bekasi dalam upaya mencapai visi, misi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya dokumen ini, kami berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat berjalan dengan lebih terarah dan sinergis. Selain itu, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjembatani berbagai program kerja tahunan yang akan dilaksanakan di tingkat Kota Bekasi, sehingga tercipta satu

kesatuan sikap dan tindakan yang harmonis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan tenaga dan pemikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan "Kota Bekasi yang Lebih Sejahtera dan Nyaman".

Bekasi, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**

**Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19720213 199901 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar.....	
B A B I P E N D A H U L U A N	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
B A B II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bekasi.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi	43
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.....	56
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	80
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	80
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi.....	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BEKASI	84
B A B V PENUTUP	103

Daftar Tabel

2.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	11
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	17
2.3	Analisis pencapaian indikator kinerja utama nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2024.....	39
2.4	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Pada DPMPTSP Tahun 2024.....	40
2.5	Analisis capaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	41
2.6	Analisis Pencapaian indikator kinerja utama Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2024	43
2.7	Target dan Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	46
2.8	Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019-2023	47
2.9	Review terhadap rancangan awal RKPD 2024	52
2.10	Sandingan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....	75
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi ...	78
3.3	Program Nasional, program Kota dan Kegiatan	78
4.1	Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 (rancangan awal) DPMPTSP Kota Bekasi	81
4.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah	82
4.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif	92

Daftar Gambar

- 1 Gambar Hubungan renja perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya 2

B A B I **P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

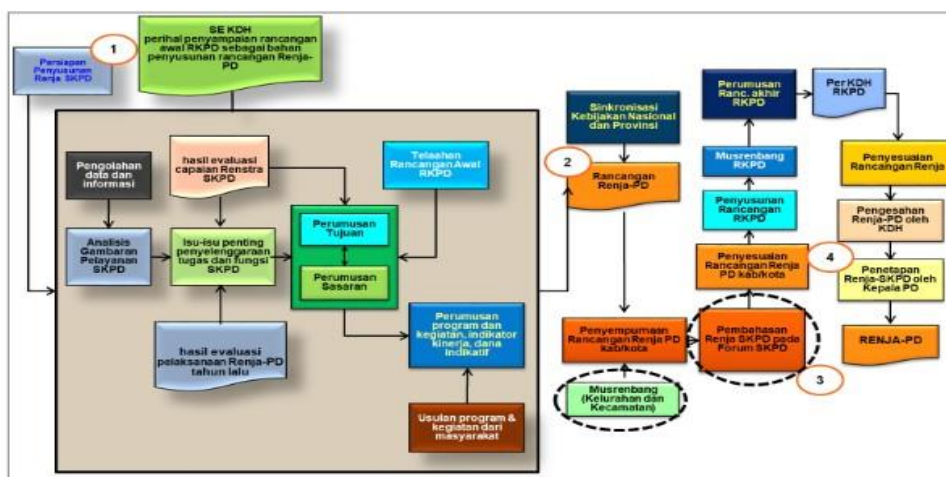
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan terkait kedua rencana tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi pada Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu satu tahun, mencakup program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunannya berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja dari tahun sebelumnya, serta evaluasi Renja tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dalam proses penyusunannya, Renja DPMPTSP Kota Bekasi wajib berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 untuk memastikan kesesuaian antara program, kegiatan,

lokasi, kelompok sasaran, dan proyeksi anggaran. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi Renja dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan optimal, sehingga mendukung pencapaian target-target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2026 juga mengacu pada Rencana Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI). Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Bekasi, yang kemudian dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) disusun secara bertahap dan saling berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Gambar di bawah ini menjelaskan tahapan-tahapan dan keterkaitan antara keduanya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Sesuai gambar diatas , penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pebetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan

- Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
 32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
 33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
 34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
 35. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 36. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 068.2/Kep.71/DPMPTSP.Set/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor :068.2/Kep.719 DPMPTSP/VII/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 37. Surat Edaran Nomor 000.7/8915/Bappelitbangda.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dalam urusan penanaman modal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi adalah :

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026 dalam mewujudkan arah capaian kinerja berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi Tahapan APBD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku;
2. Menyusun rencana strategi pencapaian indikator kinerja pembangunan DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan Tahunan Daerah;
3. Mengevaluasi Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun sebelumnya dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan;
4. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026;
5. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja pada DPMPTSP Tahun 2026;
6. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APDB tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN DPMPTSP KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

4.1 Menjelaskan perumusan kegiatan prioritas tahun 2026, dan rencana pendanaan berdasarkan pagu indikatif.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

B A B II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bekasi

Rancangan Awal (Ranwal) suatu Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan awal yang disusun oleh perangkat daerah sebagai langkah awal dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran mendatang. Ranwal ini mencakup konsep awal dari program, kegiatan, serta indikator kinerja yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut dan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebelum menjadi dokumen final yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah adalah bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi hasil. Evaluasi dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran yang ada pada tahun anggaran berjalan. Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) setiap triwulan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan penilaian lebih lanjut, dan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 bertujuan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja DPMPTSP Kota Bekasi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah.

Tujuan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah”. Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam tiga sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

Ketiga sasaran dimaksud, dapat dicapai oleh 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan dilaksanakan dalam 26 (dua puluh empat) sub kegiatan pada Tahun 2024. Pencapaian kinerja Tahun 2024 dalam mencapai sasaran secara lebih lengkap disajikan dalam Table 2.1.

**Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	A	A (84,97)	A
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	86	87,27	101,47
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	4	68,79	1.719,87%

Sumber data: Bagian Penataan Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan dan bagian Analisis keuangan pusat dan Daerah.

Dari tabel capaian kinerja di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP” ditetapkan target Nilai (LHE) AKIP yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 84,97 dengan nilai realisasi sebesar 84,97 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,85%;
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target indeks Tahun 2024 sebesar 86 dengan realisasi sebesar 87,27 dimana capaian kinerjanya mencapai 101,47%.

3. Sasaran strategis lainnya yaitu “Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi” dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 4% dengan realisasi sebesar 68,79% sehingga capaian kinerjanya sebesar 1.719,87%.

Tiga sasaran strategis di atas berkinerja cukup bagus sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan, Kemudian sasaran strategis dalam rangka Peningkatan Nilai Investasi Daerah tahun 2024 ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama DPMPTA Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Ada 10 (sepuluh) Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2024 yang Mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Pada DPMPTSP yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 19 (sembilan belas) sub Kegiatan pada masing-masing indikator program telah tercapai pada Tahun 2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 3 Indikator yaitu

1. **Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
2. **Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;**
3. **Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Penjelasan capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dokumen yang terealisasi sampai dengan triwulan IV antara lain :

- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan 1, 2, 3, dan 4;
 - Dokumen Renja Tahun 2024, Dokumen Renja Tahun 2025;
 - Dokumen SAKIP;
 - Dok Renstra 2024-2026;
 - Dokumen ZI WBK;
 - Dokumen Reformasi Birokrasi;
 - Dokumen LKIP dan;
 - Evaluasi kinerja triwulan IV
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik 100%;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik 100%.
2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik sebesar 100%;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan alokasi anggaran s.d. Triwulan IV. Untuk dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sudah tersusun dengan realisasi fisik 100%.
3. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, antara lain :
- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 2. Penyediaan bahan Logistik Kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 3. Penyediaan cetakan dan penggandaan realisasi fisik sebesar 100%;

4. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi fisik sebesar 100%;
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi Fisik 100%;
 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik sebesar 100%;
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik sebesar 100%;
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi fisik sebesar 100%;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pelayanan Penanaman Modal

Terdapat 1 (Satu) indikator pada Program Pelayanan Penanaman Modal, yaitu:

1. Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP;

Pada APBD pelaksanaan program untuk 1 (satu) sub Kegiatan yaitu : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari indikator program persentase penerbitan perizinan sesuai SOP dengan realisasi fisik 100%.

Dari indikator Program tersebut yaitu persentase penerbitan perizinan sesuai SOP realisasi 100% sampai dengan Triwulan IV dari target 100% di ambil dari realisasi jumlah izin terbit sesuai SOP sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada **Triwulan IV** yaitu sebesar 25% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah izin terbit melalui OSS dan SILAT sebanyak 85.418 izin terbit sampai dengan Triwulan IV.

Realisasi tersebut di dukung dengan adanya Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) dan Melakukan koordinasi antar bidang terkait dengan tindaklanjut pengaduan serta mengevaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

Pada indikator kedua untuk program Pelayanan Penanaman Modal sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal tidak dialokasikan anggaran Tahun 2024 namun pencapaian kinerja tersebut terealisasi fisik sebesar 100%.

Indikator Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik telah dilaksanakan Realisasi di ambil dari jumlah izin terbit sebanyak 85.418 izin dengan jumlah total pemohon sebanyak 85.418. Hal tersebut tercapai dengan melakukan evaluasi sistem, SOP,

sarana dan prasarana pendukung pelayanan pengaduan, evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan telah dilaksanakan, dengan hasil evaluasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pegawai Front Office terbaik setiap bulannya, Evaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

C. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Terdapat 1 (satu) Indikator pada program ini yaitu **Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola.**

Jumlah sistem informasi penanaman modal yang dikelola sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah sebanyak empat sistem. Realisasi yang tercapai pun sesuai dengan jumlah target tersebut, di mana keempat sistem informasi ini terus dipelihara dan diperbarui untuk mendukung kelancaran proses penanaman modal. Sistem-sistem yang dikelola tersebut terdiri dari beberapa platform, di antaranya adalah SILAT V2, yang dapat diakses melalui tautan <https://silat.bekasikota.go.id/>. Selain itu, terdapat juga Simpelantri, sebuah platform yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi terkait penanaman modal. Kemudian, ada SiiBeken, yang dapat diakses di siibeken.bekasikota.go.id, yang juga mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal di wilayah tersebut. Terakhir, ada website DPMPTSP (dpmptsp.bekasikota.go.id) yang menyediakan informasi lebih lanjut dan layanan yang diperlukan oleh para investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal penanaman modal. Keempat sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan penanaman modal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor.

Realisasi tersebut di dukung dengan adanya Ketercapaian maintenance sistem dengan target dapat terlaksana dengan baik, Tersedianya sarana dan prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di MPP dan GPP, sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada MPP dan GPP serta

Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala untuk menunjang kegiatan dan proses pelayanan dan perizinan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Tindaklanjut pada triwulan IV untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM yang meningkat di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana aksi atas hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP);
2. Melakukan pengelolaan sistem, sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung pelayanan pengaduan;
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan tela dilaksanakan, dengan hasil evaluasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pegawai Front Office terbaik setiap bulannya.
4. Melakukan evaluasi Gerai pelayanan pada MPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat per triwulan;
5. Implementasi sistem IKM online melalui SILAT pada DPMPTSP yang terintegrasi dengan Sisukma
6. Pembuatan website investasi DPMPTSP Kota Bekasi yang bertujuan untuk melakukan simplikasi atau penyerderhanaan menu yang mudah dipahami (user friendly) tanpa mengurangi isi dari website dan mengintegrasikan saluran-saluran informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

D. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi.**

Pada indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi realisasi capaian kinerja Pada Indikator

tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah 352,93% dari target Tahunan sebesar 12.000.

Realisasi didapat dari NIB terbit tahun berjalan sebanyak 42,352 di bagi dengan Jumlah NIB existing sebanyak 32.056 di kali 100%. Hal tersebut diatas sesuai dengan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTSP yang dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dengan menggunakan sistem OSS berbasis resiko (OSS RBA) oleh Kementrian Investasi dan BKPM RI dan Peraturan Kepala BKPM serta Kepwal Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor :060/Kep.271-Org/VIV/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

E. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memiliki satu indikator utama,yaitu **Persentase Peningkatan investor baru.**

Pada indikator program yaitu Persentase Peningkatan Investor Baru dengan realisasi 47% sampai dengan Triwulan IV dari target 4% di ambil dari realisasi jumlah NIB terbit sebanyak 42.352 di bagi KBLI aktif sebanyak 90.103 di kali 100%

Realisasi tersebut didukung Berdasarkan data jumlah penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal dan perkembangan penanaman modal di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang baik, walaupun jumlah penanaman modal atau investor skala nasional maupun asing masih fluktuatif. Meskipun iklim investasi di Kota Bekasi semakin membaik dan meningkat setiap tahunnya, masih ada kendala lain yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang mampu menghambat kemajuan perusahaan yang beroperasi di Kota Bekasi. Kendala tersebut seharusnya menjadi perhatian utama dan juga tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat menemukan solusi terbaik agar tercipta kenyamanan, keamanan dalam

berinvestasi serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha yang menanamkan modal mereka di Kota Bekasi.

F. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program tersebut memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM.**

Pada APBD pelaksanaan program untuk 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dari indikator program Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM dengan realisasi fisik 100%. Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM dengan realisasi 95,79% (20.912) dari target 14,5% /Renstra, berbeda dengan target RPD yaitu 16% dengan realisasi 95,79%.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi sampai dengan tahun 2024 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1		Urusan Wajib									
1	20	Bidang Urusan wajib otonomi daerah,pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan Persandian									
		Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPPTSP	Nilai LHE AKIP DPMPPTSP Kota Bekasi	83,85	84,57	100%	98,91	98,91	A	-	-
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	83,10	85,31	86	88,01	102,33	86	-	-
2	1201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	88%	100%	99,12%	99,12%	100%	-	-	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	96,75%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	1201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	75%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	100%	100%	-	-	-	-	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	8 laporan	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	1201	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	99,12%	99,12%	100%	-	-
2	120101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100% - 1.792 orang/bulan	- - 1.792 orang/bulan	- - 1708 Orang/Bulan	- - 1.678 Orang/Bulan	- - 98,24%	- - 1846 Orang/Bulan	-	-
2	120105	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100% -	1 Laporan -	- 4 Laporan	- 4 Laporan	- 100%	- 19 laporan	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	1205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2	1205 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1205 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang	15 orang	15 orang	100%	5 orang	-	-
2	1206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	-
2	120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-
2	120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah penggandaan	-	-	-	-	-	-	-
				1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan									
2	120605	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	-	-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
2	120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ perjalanan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Jumlah arsip yang ditata/dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen	600 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Dokumen	-	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	
		Pengadaan Mebel									
		Jumlah Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	21 unit	17 unit	92,98%	1 unit	-	-	
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung	-	-	46 Unit	46 Unit	95,07%	-	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kantor atau bangunan lainnya yang disediakan									
2	1208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 12 Laporan	- 12 Laporan	- 12 Laporan	- 12 Laporan	- 100%	- 12 Laporan	-	-
2	120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan Luas bangunan	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah tenaga pelayanan umum kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
2	1209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	1209 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- 7 Unit	- 7 Unit	- 2 unit	- 2 unit	- 100%	- 2 Unit	- -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	-	-
2	1209 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 108 Unit	- 108 Unit	- 80 Unit	- 80 Unit	- 100%	- 80 Unit	-	-
2	1209 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- 1 unit	- -	- 1 unit	- 1 unit	- 100%	- 1 unit	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	18 2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	Rp. 13.868.153.684.143	-7,17% 12.378.837.008.972,-	650.000.000 -	,-	100%	-	-	-
			Persentase peningkatan investor baru	-	-	-	-	4%	-	-	
2	18 2 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Penanaman Modal Berdasarkan LKPM	100%	75%	100%	-	-	-	-	
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal	-	-	-	-	100%	-	-	
2	18 2 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Profil Pemantauan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Laporan Profil Pengawasan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	
			Instruksi Wali Kota Tentang Fasilitas Pelayanan Perizinan Khusus untuk UMKM/IKM	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Perda	-	-	-	-	-	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	1802	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1802	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	18022	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Terupgrade	-	-	-	-	-	-	-	
2	183	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP	5.113 izin	68.317 izin	-	1.336,1%	-	-	-	
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi	-	-	7.886 izin	7.886 izin	100%	13.000 jumlah	-	
2	1832	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
2	1832	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	18 4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik	113	164	100%	100%	100%	100%	-	-
			Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik	100%	160,21%	100%		-	-	-	-
			Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP	-	-	-				-	-
			Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	18 4 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											LEMBAR :
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu	-	-	-	-	-	-	-	
2	18 4 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Jenis layanan MPP/GPP Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	113 Layanan 10.000 Pelaku usaha	164 layanan 10.000 Pelaku usaha	- -	- -	- -	- -	- -	
		Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	-	-	11.000 Pelaku Usaha	11.000 Pelaku Usaha	100%	11.000 Pelaku Usaha	-	
2	18 4 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaan Modal	Jumlah Laporan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat	-	-	-	-	-	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	60 Kegiatan Usaha 500 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha -	- 500 Kegiatan Usaha	- 500 Kegiatan Usaha	- 100%	- 500 Kegiatan Usaha	- -	- -	
2	18 5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	28%	287%	26%	26%	26%	16%	-	-
2	18 5 2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Meningkatnya Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	28%	287%	100%	100%	100%	16%	-	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											LEMBAR :
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18 5 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	692 Pelaku Usaha	692 Pelaku Usaha		100%	-	-	-	
			Jumlah berita acara hasil pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	
2	18 5 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN yang diawasi, di monitor dan di evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan simkronisasi pengawasan	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha		-	-	-	-	
			Jumlah kendaraan operasional pelayanan public	1 unit	dikarenakan berdasarkan amanat pasal 10 peraturan menteri keuangan no.67 tahun 2024 dan surat pemberitahuan no.900/7616/bappelitbangda.AP\$EP tentang penyerapan dana insentif fiska pada kegiatan ini tidak diperkenankan baik anggaran maupun output kegiatan).		-	-	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN			
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	18 5 4	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-	-	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	100%	10 kegiatan usaha	-	-	
2	18 5 5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	100%	300 pelaku usaha	-	-	
2	18 5 6	Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	-	-	519 kegiatan usaha	519 kegiatan usaha	100%	519 kegiatan usaha	-	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	18 6	Program Pengelolaan Data Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah system informasi penanaman modal yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	18 2	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Pelayanan Perizinan Online yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	18 2 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan Online	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Aplikasi Dikelola	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IT	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Sertifikat ISO 9001:2015	-	-	-	-	100%	-	-	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	-	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Website Investasi Jumlah sarana prasarana Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi website investasi	1 aplikasi 25 unit 54 orang	(dikarenakan berdasarkan amanat pasal 10 peraturan menteri keuangan no.67 tahun 2024 dan surat pemberitahuan no.900/7616/bappelitbangda.AP\$EP tentang penyerapan dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan baik anggaran maupun output kegiatan).			- -	- - -	- - -	- -

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, DPMPTSP Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut. Terdapat tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi, dimana tujuannya tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat;
3. Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

dengan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Indikator yang menjadi patokan peningkatannya dapat dilihat melalui Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi dengan indikator peningkatan persentase pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah Kota Bekasi.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas hasil kerja setiap instansi . Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Dalam konteks DPMPTSP Kota Bekasi, akuntabilitas kinerja menjadi sangat penting karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan perbaikan iklim investasi. Dengan adanya akuntabilitas kinerja, DPMPTSP dapat dipertanggungjawabkan atas pencapaian target-target yang telah ditetapkan, seperti peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Indikator yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah yang merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3

**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	6	7	8
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	A	A (84,97)	101,33%

Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah.

Berdasarkan tabel capaian indikator Nilai (LHE) AKIP tahun 2024, DPMPTSP Kota Bekasi telah mencapai kinerja yang sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 83,85% telah berhasil dilampaui dengan capaian aktual sebesar 84,97%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP telah berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif dan efisien

Adapun rekapitulasi perolehan Nilai AKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.4

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DPMPTSP KOTA BEKASI KOTA BEKASI TAHUN 2024**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	2	3	5
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,00
B	PENGUKURAN KINERJA	30,00	23,88
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,37
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25,00	21,72
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah 86, sementara realisasinya mencapai 88,01. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2024 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mencapai 102,33%, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 2.5
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKM
TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	86	88,01	102,33

Sumber data : Laporan Tahunan DPMPTSP Tahun 2023

Nilai IKM unit Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi sebesar 88,01 menempatkan DPMPTSP Kota Bekasi atas Mutu Pelayanan pada kategori **A**.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2024 melebihi target (101,47%), yang menunjukkan bahwa predikat kinerja secara umum masuk dalam kategori tinggi. Keberhasilan ini didorong oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersosialisasikannya kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai pelayanan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Bekasi melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak dan website serta media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook.
2. Telah terstandardisasikannya pelayanan perizinan pada DPMPTSP melalui beberapa Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Standard Operasional Prosedur pelayanan perizinan;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat pemohon izin;
4. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan perizinan kepada;
5. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi dan inovasi secara berkelanjutan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
 - Simplikasi perizinan;
 - Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
 - Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi *tracker* (pelacakan/pegecekan progress);
 - Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online* di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online;

- Penggunaan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/ kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dari perangkat daerah teknis dalam bekerjasama terkait proses penerbitan perizinan;
2. Adanya dukungan dari APBN berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Animo PMA/PMDN yang patuh terhadap LKPM sehingga berpengaruh terhadap nilai investasi yang di dapat pada Triwulan IV.

Adapun langkah-langkah yang akan terus dilakukan pada tahun 2026 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Berkomitmen pada rencana aksi yang sudah dibuat dan target kinerja setiap bulan dan triwulannya serta memaksimalkan sumber daya baik itu manusia maupun anggaran yang ada.

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui inovasi pengintegrasian sistem pelayanan yang ada dengan instansi lainnya yang belum bekerja sama dengan DPMPTSP Kota Bekasi seperti BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Pajak, dan Konsil Kedokteran Indonesia (KIK). Strategi lainnya adalah melalui peningkatan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan dan sekaligus membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada DPMPTSP Kota Bekasi

Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 terkait dengan nilai realisasi investasi mengacu pada Tujuan Peningkatan Nilai Investasi Daerah, serta Sasaran Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi dimana indikator tujuan/ sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi, dimana Target Persentase Peningkatan Investor Baru pada tahun 2024 sebesar 4% dengan realisasi sebesar 68,79 % sehingga capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Nilai (PMA/PMDN) sebesar 1.7191,87%

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa target sasaran strategis peningkatan nilai investasi daerah yang telah ditetapkan tidak tercapai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.6
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelaku Usaha yang Berinvestasi	%	4%	68,79% (20.912)	1.719,87

Sumber data: Laporan investasi dari bidang Penanaman Modal Dinas PMPTSP

Keberhasilan pencapaian target peningkatan nilai investasi daerah tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan.
2. Memberi surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk lapor LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi.
3. Sosialisasi LKPM melalui media sosial Twitter, Instagram DPMPTSP dan kunjungan ke pelaku usaha di Kota Bekasi meliputi Pemantauan, Pengendalian dan pengawasan;

4. Konsultasi di tempat perihal pelaporan LKPM di lobby Kantor DPMPTSP.
5. Ditunjang oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) fasilitas penanaman modal dalam melakukan sosialisasi;
6. Realisasi PMA sebesar 2.484, Realisasi PMDN sebesar 12.368.
Total realisasi PMA/PMDN adalah 14.852.

Untuk meningkatkan kinerja capaian atas indikator peningkatan nilai investasi daerah sehingga mampu mancapai target yang telah ditetapkan dibutuhkan strategi yang tepat dari Pemerintah Kota Bekasi agar mampu menarik minat calon investor untuk berinvestasi melalui kebijakan kemudahan berinvestasi di wilayah Kota Bekasi salah satunya yaitu dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kemudahan berinvestasi di Kota Bekasi dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor, meningkatkan efektivitas strategi, peningkatan investasi dalam pengembangan UMKM dan upaya promosi investasi dan menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMDN/PMA.

Dalam usaha pencapaian target kinerja tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan indikator program yang dilakukan oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda sesuai target masing-masing dalam rangka penyelarasan antara kegiatan sebagai unsur tercapainya indikator program;
2. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada pimpinan dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program sehingga tercapai keselarasan antara capaian indikator program sebagai unsur terpenuhinya indikator sasaran.
3. Menghadiri Rapat Kinerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke – XVI Tahun 2024 dan Giat Makasar Investment Forum pada tanggal 11 Juli sampai dengan 14 Juli 2024 di Makasar;

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi (TP3) yang membidangi penanaman modal / investasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Melaksanakan koordinasi dengan KADIN Kota Bekasi terkait persiapan pelaksanaan Road to Bekasi Investment Gathering (BIG) ke – 2;
6. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi terkait data UMKM binaan sebagai peserta kemitraan dengan Pelaku Usaha;
7. Koordinasi dengan Pelaku Usaha terkait perjanjian kerjasama/kemitraan dengan UMKM binaan Pemerintah Kota Bekasi;
8. Melaksanakan giat Talk Show Road to Bekasi Investment Gathering (BIG) ke – 2 pada tanggal 2 Agustus 2024 bertempat di Balai Patriot Kota Bekasi;
9. Mengadiri kegiatan IKM Hunter Goes to Bekasi yang diselenggarakan oleh KADIN Kota Bekasi pada tanggal 23 Agustus bertempat di Aula Garuda BBPVP Menaker, Kayuringin Kota Bekasi;
10. Mengikuti kurasi UMKM yang diselenggarakan pada tanggal 5 September 2024 bertempat di LSPR Kota Bekasi guna mendukung seleksi produk UMKM unggulan untuk GO Eksport, Go Retail, dan Go Internasional.
11. Membuat Nota Kesepakatan Kerja Sama antara DPMPTSP Kota Bekasi, KADIN Kota Bekasi dan Pelaku Usaha;
12. Melaksanakan kegiatan Bekasi Investment Gathering (BIG) Tahun 2024 dengan tema “Mengusung Jejaring dan Kemitraan untuk Investasi Tumbuh di Kota Bekasi” pada tanggal 7 September 2024 di XXI Lounge Mega Mall Bekasi.
13. DPMPTSP Kota Bekasi bekerjasama dengan Bank BJB Cabang Bekasi menyelenggarakan acara BIG HUG (Bekasi Investment Gathering Harmonious Urban Governance) yang berlangsung di XXI Lounge Mega Bekasi Hypermall. Kamis, 22 Agustus 2024.
14. Melakukan Talkshow bersama elganggafm dengan tema "Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi". Diskusi ini akan membahas fungsi serta layanan di MPP dan GPP Kota Bekasi, sekaligus mensosialisasikan rencana pemindahan lokasi MPP Kota Bekasi yang akan dilakukan pada 2 Desember 2024, dari BTC Mall 2 Jl. Joyonmartono ke Gedung Ex-Disnaker Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi.

15. Melakukan Talkshow bersama elganggafm dengan tema "Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi". Diskusi ini akan membahas fungsi serta layanan di MPP
16. dan GPP Kota Bekasi, sekaligus mensosialisasikan rencana pemindahan lokasi MPP Kota Bekasi yang akan dilakukan pada 2 Desember 2024, dari BTC Mall 2 Jl. Joyonmartono ke Gedung Ex-Disnaker Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi.
17. Melakukan Kegiatan Peresmian Mal Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 yang berlokasi berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.13, Kota Bekasi.
18. Melaksanakan Kegiatan Gebyar Pelayanan Terpadu 2024 West Java Investment Award Dan Cifest di Mal Pelayanan Publik yang dilakukan pada Selasa 17 Desember 2024

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Capaian realisasi atas target sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada rincian tabel 2.7 dan 2.8 berikut :

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

**Tabel 2.7
Target dan Realisasi Sasaran DPMPSTSP Kota Bekasi
Tahun 2020 s.d Tahun 2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN					PROYEKSI TINGKAT CAPAIAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Misi Kesatu : Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPSTSP	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPSTSP	Nilai (LHE) AKIP DPMPSTSP	Indeks	-	83,75	83,85	83,85	-	-	84,47	84,60	84,57	84,97	-	-	100,85%	101%	100,85%	101,33%	
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84,11	89,82	85,31	88,01	-	100%	101,45%	108,21%	102,66%	102,33%	-

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Misi Keempat: Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat	Peningkatan daya saing investasi daerah	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen (%)	10%	4%	4%	4%	4%	-14,83%	22,6% Rp.8.167.096.033.071	63,27% Rp.13.334.763.157.830	-7,17 (Rp.12.378.37.008.972)	-	148,3%	565%	1.582%	-179,25%	-
--	---	--	---	------------	-----	----	----	----	----	---------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--------	------	--------	----------	---

**Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONA L	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISA
				TAHUN 2020 (THN N-2)	TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THN N)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	TAHUN 2020 (THNN-2)	TAHUN 2021 (THN N-1)	TAHUN 2022 (THN N)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPSTP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	-	83.75	83.80	83.85		83,63	84,47	84,60	84,57	84,97	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	Rumus : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan)	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84.11	89,82	85,31	88,01	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONA L	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISA
				TAHUN 2020 (THN N-2)	TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THN N)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	TAHUN 2020 (THNN-2)	TAHUN 2021 (THN N-1)	TAHUN 2022 (THN N)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	
			Rumus : IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X $\frac{\text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25											
3.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	Rumus : $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha (Tahun N)} - \text{Jumlah pelaku usaha (Tahun N-1)}}{\text{Jumlah pelaku usaha N-1}} \times 100$	10% (Rp.12.656.66 4.740.808,00)	4%	4%	4%	4%	-14,83% (Rp6.661.394. 899.708)	22,6% Rp.8.167.09 6.033.071	63,27 Rp. 13.334.76 3.157.830	-7,17% (Rp.12.37 8.837.008 .972).	68,79%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan publik dalam bidang perizinan dan penanaman modal, dengan tujuan utama meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kota Bekasi, serta mendorong perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah pusat menyadari bahwa rendahnya investasi di Indonesia disebabkan oleh prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu di berbagai sektor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dalam regulasi untuk menyederhanakan proses perizinan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah salah satu langkah pemerintah dalam menciptakan kemudahan bagi investor.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, terdapat 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang diterbitkan. Dua di antaranya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ditugaskan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun beberapa peraturan turunan, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Peralihan Perizinan Berusaha di Daerah, Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdiri sendiri dan non-tipologi, serta penyusunan peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan delegasi kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, ada pula tugas untuk penetapan dan pelantikan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga mencakup penerapan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Assessment), yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan dengan

meminimalkan birokrasi, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin berusaha. Dalam sistem ini, perizinan dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Dari situasi yang dihadapi baik di tingkat nasional maupun internasional, Kementerian Investasi/BKPM mengidentifikasi sejumlah isu strategis terkait dengan penanaman modal yang perlu mendapatkan perhatian, guna mengoptimalkan peluang dan mengatasi permasalahan yang ada. Adapun isu strategis Kementerian Investasi/ BKPM Tahun 2020-2024 tersebut adalah :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan *investor needs*.

Dalam rangka mendorong perekonomian, Pemerintah Kota Bekasi sangat membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk investasi. Baik investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu cara utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi/ BKPM dalam rencana aksinya antara lain :

- ❖ Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- ❖ Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
- ❖ Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
- ❖ Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi, melalui DPMPTSP, terus berupaya untuk melaksanakan dan memperbaiki berbagai kebijakan yang dapat menarik dan

meningkatkan minat investasi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai dan terwujud, salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan.

Untuk meningkatkan hasil yang diharapkan pada tahun 2025 dan 2026, DPMPTSP akan menerapkan sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan investasi, di antaranya adalah kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan.:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
3. Melaksanakan promosi penanaman modal;
4. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategi promosi penanaman modal;
5. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
6. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi 'ramah investasi';
7. Memfasilitasi pembukaan akses pasar melalui kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan cara membantu dalam pembuatan MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
8. Membantu proses perluasan akses pembiayaan perbankan bagi UMKM melalui fasilitasi pemerintah yang menghubungkan antara UMKM dan pihak perbankan/lembaga keuangan melalui pembuatan MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
9. Mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
10. Menyusun Perda Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha yang di dalam perda tersebut memuat substansi insentif dan kemudahan berusaha sehingga dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi;
11. Menyusun RUPM sebagai acuan bagi Pemkot Bekasi dalam membuat kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal;
12. Membuat aplikasi terbaru dan video potensi peluang investasi untuk memudahkan investor dalam mencari informasi baik perizinan maupun pendukung investasi;
13. Menyiapkan data *based* potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW);

14. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
15. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
16. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
17. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam meningkatkan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
18. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
19. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
20. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
21. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
22. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
23. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

Mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan yang ada, hasil analisis kebutuhan ini nantinya dituangkan pada Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2026, selain memperhatikan RPD 2024-2026 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Pra Musrenbang Kelurahan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (bottom-up). Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD yang di tuangkan ke dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini .

Tabel 2.9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi
Tahun 2026

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bekasi	1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	28.486.540.340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	28.486.540.340	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.000.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.000.000	
		Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	24.046.337.000		Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	24.046.337.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.046.337.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.046.337.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5880 Orang /Bulan	24.034.337.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5880 Orang /Bulan	24.034.337.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	15 laporan	12.000.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	328.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	328.750.000	
4.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	278.750.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	278.750.000	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.220.060.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.220.060.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.220.060.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.220.060.000	
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laopran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laopran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	400.000.000	
13.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.060.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.060.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	435.980.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	435.980.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	435.980.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	435.980.000	
14.	Pengadaan Mebel	Kota Bekasi	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	5 Unit	170.533.000	Pengadaan Mebel	Kota Bekasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	170.533.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	265.447.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	265.447.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.771.753.340		Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.771.753.340	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.771.753.340	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.771.753.340	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	736.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	736.000.000	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.035.753.340	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.035.753.340	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	641.660.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	641.660.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	641.660.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	641.660.000	
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	100.000.000	
20.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	275.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	275.000.000	
9.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Penanaman Modal	1 Dokumen	75.000.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Penanaman Modal	1 Dokumen	75.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	75.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	
	Kegiatan pembuatan Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal	100%	200.000.000	Kegiatan pembuatan Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal	100%	200.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
III.	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	14.000	350.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	14.000	350.000.000	Beberapa Kegiatan dan sub kegiatan dan indikator berubah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	dan keuangan daerah)
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	100%	5.451.684.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	100%	5.451.684.000	Beberapa sub kegiatan dan indikator berubah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah)
10.	Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	100%	5.451.684.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/ Kota	100%	5.451.684.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	1 Dokumen	365.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	1 Dokumen	365.000.000	
25.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	13.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	13.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	
26	Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha					perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha			
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	15,5	450.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	15,5	450.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	15,5	450.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	15,5	450.000.000	
27.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
28.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	600 Pelaku Usaha	200.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	600 Pelaku Usaha	200.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
29.	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	
VI.	Program pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	4	525.319.070	Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	4	525.319.070	Beberapa sub kegiatan dan indikator berubah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun
12.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang dimanfaatkan	100%	525.319.070	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non		Persentase sistem pelayanan perizinan online yang dikelola	100%	525.319.070	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PER,MENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah)
30.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	
			BLPU		28.468.540.340			BLPU		28.468.540.340	
			BLU		7.052.003.070			BLU		7.052.003.070	
			Total Anggaran		35.520.543.410			Total Anggaran		35.520.543.410	

Untuk Target pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024-2026 terdapat beberapa perbedaan dan sudah dilakukan dengan metode sandingan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Renstra Tahun 2024-2026 beserta alasannya, data tersebut dapat dilihat di Tabel 2.12 sebagai berikut :

TABEL 2.10
SANDINGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

KODE			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RPD					RENSTRA				
					Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir	Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah Perusahaan PMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	10,5%	16%	21%	26%	26%	14%	14,5%	15%	15,5%	15,5%

Target Kinerja Program di Renstra Mengalami Perubahan Seperti diatas dikarenakan :

1. Penghitungan target untuk realisasi tahun 2018-2023, masih menggunakan target yang di tetapkan diawal RPJMD 2018-2023 sebanyak 4310 pelaku usaha yang memiliki izin;
2. untuk kondisi awal yang akan digunakan, penghitungan dasar Tahun 2024 menggunakan data terbaru realisasi investasi yang ada sistem OSS RBA Tahun 2021 sebanyak 21.830 pelaku usaha yang sudah memiliki izin (NIB) dan realisasi jumlah pelaku usaha yang tertib/patuh LKPM sebanyak 3115 di Tahun 2021 :

$$\frac{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh LKPM}}{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN}} \times 100\% = \frac{3115}{21830} \times 100\% = 14\%$$
3. Pelaku usaha yang tertib lapor LKPM menggunakan data terupdate Tahun 2021, untuk rumusan tidak ada perubahan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan misi Presiden Terpilih Periode 2024-2029 menetapkan tema pembangunan “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. ini dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, yang merupakan bagian dari RPJPN 2025-2045, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa.

RPJMN 2025-2029 menjadi landasan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Emas. Penguatan transformasi ekonomi menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan pembangunan 2045, termasuk infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Dalam perencanaan pembangunan 2026, yang menyatukan sistem perencanaan Kota Bekasi dengan nasional dan provinsi, pelaksanaan dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Rencana tata ruang diintegrasikan dengan rencana pembangunan, berdasarkan kondisi dan potensi daerah. Penyusunan Renja DPMPTSP menyesuaikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD dan RKPD 2024-2026.

Tema pembangunan daerah pada Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi 2026 adalah “Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian”. Sasaran pembangunan 2026 adalah mencapai target RPJMN 2025-2045 dan menciptakan fondasi kokoh untuk pembangunan periode 2025-2030 melalui :

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator : (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2026, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) penguatan daya saing usaha;

- 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energy;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dan
- 7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Dalam mendukung prioritas Pembangunan Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berperan membantu Wali Kota dalam urusan pemerintahan terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas ini berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan nilai investasi daerah. Hal ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, yang dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan serta menghapus kemiskinan ekstrem.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Dalam pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan rencana kerja :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi;

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

DPMPTSP

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

kepada Masyarakat;

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan multi prima kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan profesional, ramah, ikhlas, mudah, dan akuntabel.

Indikator : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

3. Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi

Indikator : **Peningkatan Nilai Investasi.**

b. Sasaran

Sasaran rencana kerja :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP.**

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan responsive melalui PTSP yang terintegrasi.

Indikator : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang informative berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pada pelayanan prima baik PMA/ PMDN guna peningkatan investasi.

Indikator : **Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.**

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
				2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,20
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,20
3.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-	Peningkatan Nilai Investasi	7%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	4%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DPMPTSP KOTA BEKASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi adalah sebuah lembaga teknis daerah yang bertugas membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu. Tugas pokok dan fungsi ini dilakukan dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai acuan dasar atau pedoman konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pada proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Rancangan awal RKPD Tahun 2026.

Dalam rencana awal penyusunan program dan kegiatan, DPMPTSP memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dari Belanja Langsung Urusan dengan total anggaran sebesar Rp 35.520.543.410,- (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Terdapat beberapa nomenklatur kegiatan, sub kegiatan, serta indikator yang perlu diubah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan pemutakhiran nomenklatur sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.**

Terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan dari Kegiatan ini, yaitu :

1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dimana tujuannya untuk mengembangkan system pelayanan

sehingga seluruh pelayanan perizinan dapat dilakukan secara online.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan dari Kegiatan di atas yaitu :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan arah pengembangan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi, dan realisasi investasi.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan pada kegiatan ini, yaitu :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Bekasi. Tujuan program ini yaitu menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi di Kota Bekasi.

Kegiatan dalam program ini yaitu :

- **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pada kegiatan ini, yaitu :

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya;

2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha;
3. Pengawasan Penanaman Modal.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Program Nasional, Program Kota dan Kegiatan

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangann Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal.		2. Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/ Kota.	
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.	
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Rumusan rencana program dan kegiatan DPMPSTP Kota Bekasi Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Awal)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100% 100% 100%	28.486.540.340	PAD		100%	28.424.789.240
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	24.000.000	PAD		100%	16.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 dokumen	12.000.000	PAD		2 dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	7 Laporan	12.000.000	PAD		7 Laporan	8.000.000	
2	18	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	24.046.337.000	PAD	100%	15.417.378.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	18	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	5880 Orang /Bulan	24.034.337.000	PAD		4820 Orang /Bulan	15.417.378.000
2	18	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kota Bekasi	15 laporan	12.000.000	PAD		15 laporan	8.000.000
2	18	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	328.750.000	PAD		100%	350.000.000
2	18	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kota Bekasi	1 paket	278.750.000	PAD		1 Paket	200.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	18	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	50.000.000	PAD		5 Orang	150.000.000
2	18	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	1.220.060.000	PAD		100%	1.430.000.000
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD		1 Paket	20.000.000
2	18	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	0	0	PAD		1 Paket	100.000.000
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	480.000.000	PAD		1 Paket	480.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	200.000.000	PAD		1 Paket	200.000.000
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD		12 Dokumen	30.000.000
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	50.000.000	PAD		12 Laporan	50.000.000
2	18	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	400.000.000	PAD		12 Laporan	450.000.000
2	18	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.060.000	PAD		12 Dokumen	100.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	18	1		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bekasi	100%	435.980.000	PAD		100%	300.000.000
2	18	1	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	5 Unit	170.533.000	PAD			
2	18	1	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bekasi	20 Unit	265.447.000	PAD		10 Unit	300.000.000
2	18	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	1.771.753.340	PAD		100%	10.234.760.240
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	736.000.000	PAD		12 Laporan	747.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.035.753.340	PAD		12 Laporan	9.487.760.240
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi	100%	641.660.000	PAD		100%	676.660.000
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD		2 Unit	86.660.000
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD		12 Unit	240.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		90 Unit	100.000.000	PAD		90 Unit	100.000.000
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	215.000.000	PAD		1 Unit	250.000.000
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Baru	Kota Bekasi	4%	275.000.000	PAD		4%	400.000.000
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	75.000.000	PAD		-	200.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2	03	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usah besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	75.000.000	PAD		-	200.000.000
				Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD		100%	200.000.000
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Dokumen	200.000.000	PAD		-	-
				Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta potensi Investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Dokumen	200.000.000
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investigasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	-	-	PAD			

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	PAD		14.000 Pelaku Usaha	450.000.000
2	18	03	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD		100%	450.000.000
2	18	03	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD		3 Dokumen	450.000.000
2	18	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD		100%	5.715.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	18	1		Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD		100%	5.715.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	Kota Bekasi	1 Dokumen	365.000.000	PAD		1 Dokumen	365.000.000
2	18	1	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	PAD		13.500 Pelaku Usaha	5.000.000.000
2	18	1	8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah	Kota Bekasi	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	PAD		600 Kegiatan Usaha	350.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha									
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	Kota Bekasi	15,5%	450.000.000	PAD		16%	700.000.000
2	18	05	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh Terhadap kewajiban LKPM	Kota Bekasi	15,5%	450.000.000	PAD		100%	700.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 05 5	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Bekasi			PAD		-	-
2 18 05 6	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku usaha	200.000.000	PAD		600 Pelaku usaha	400.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	PAD		500 Kegiatan Usaha	300.000.000
2	18	2		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Kota Bekasi	4	525.319.070	PAD		3 sistem	750.000.000
2	18	2		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem pelayanan preizinan online yang dikelola	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD		100%	750.000.000

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD		12 Dokumen	750.000.000
					BLPU			28.468.540.340				28.424.798.240
					BLU			7.052.003.070				8.015.000.000
					Total Anggaran			35.520.543.410				36.439.798.240

Perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu, juga mengacu pada Renstra BKPM Tahun 2020-2024, RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, dan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dengan dasar tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi telah merumuskan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Pelaksanaan program dan kegiatan ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Bekasi, yaitu meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik.

Untuk mendukung arah kebijakan yang ditentukan dalam RKPD Kota Bekasi, program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan Arah Kebijakan 5 adalah peningkatan kekuatan dan stabilitas ekonomi kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri, dan usaha kecil berbasis ekonomi kerakyatan.

Adapun Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	28.486.540.340	PAD	
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	24.000.000	PAD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 dokumen	12.000.000	PAD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	8 Laporan	12.000.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 18 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	24.046.337.000	PAD	
2 18 1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	4820 Orang /Bulan	24.034.337.000	PAD	
2 18 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kota Bekasi	15 laporan	12.000.000	PAD	
2 18 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	328.750.000	PAD	
2 18 1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kota Bekasi	1 paket	278.750.000	PAD	
2 18 1 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	50.000.000	PAD	
2 18 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	1.220.060.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD	
2	18	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	0	0	-	
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	480.000.000	PAD	
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	200.000.000	PAD	
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD	
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	50.000.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 18 1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	400.000.000	PAD	
2 18 1 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.060.000	PAD	
2 18 1	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bekasi	100%	435.980.000	PAD	
2 18 1 1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	5 Unit	170.533.000	PAD	
2 18 1 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bekasi	20 Unit	265.447.000	PAD	
2 18 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Bekasi	100%	1.771.753.340	PAD	
2 18 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	736.000.000	PAD	
2 18 1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.035.753.340	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi	100%	641.660.000	PAD	
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD	
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD	
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		90 Unit	100.000.000	PAD	
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	215.000.000	PAD	
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Baru	Kota Bekasi	4%	275.000.000	PAD	
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	75.000.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2	03	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usah besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	75.000.000	PAD	
				Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Dokumen	200.000.000	PAD	
				Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta potensi Investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Kota Bekasi	-	-	PAD	
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investigasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	-	-	PAD	
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 18 03	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD	
2 18 03 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD	
2 18 1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD	
2 18 1	Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD	
2 18 1 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Kota Bekasi	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	PAD	
2 18 1 8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang	Kota Bekasi	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban	Kota Bekasi	15%	450.000.000	PAD	
2 18 05	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh Terhadap kewajiban LKPM	Kota Bekasi	15%	450.000.000	PAD	
2 18 05 5	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Bekasi			PAD	
2 18 05 6	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku usaha	200.000.000	PAD	
2 18 05 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	PAD	

**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Kota Bekasi	4	525.319.070	PAD	
2	18	2		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem pelayanan perizinan online yang dikelola	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD	
2	18	2	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD	
					BLPU			28.468.540.340		
					BLU			7.052.003.070		
					Total Anggaran			35.520.543.410		

B A B V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2026, dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2026 setelah adanya anggaran kegiatan. Rencana Kerja DPMPTSP (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, Renja juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini:

1. Kewajiban Bersinergi dan Terintegrasi: Seluruh Bidang, Sekretariat, dan Tim Teknis berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 secara bersinergi dan terintegrasi.
2. Evaluasi dan Analisis: Tim Penyusun Perencanaan Kinerja Investasi di DPMPTSP Kota Bekasi menyusun evaluasi, mengkaji, dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2026 berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat. Hasil evaluasi, kajian, dan analisis Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 menjadi bahan dasar penyusunan Renja Dinas Tahun 2026 dan 2026.
3. Pelaksanaan Program Indikatif: Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin. Semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh

karena itu, perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

4. Jabaran RAPBD Tahun 2026: Sebagai langkah awal dalam menyusun Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) Tahun 2026, Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

5. Monitoring dan Evaluasi: Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi Renja setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Dinas.

6. Evaluasi Kinerja: Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.

7. Periode Berlaku: Renja DPMPTSP Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan semangat bersama untuk merealisasikannya demi mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadikan Kota Bekasi sebagai kota tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan.